

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu badan usaha yang anggotanya terdiri dari orang-orang atau Badan Hukum Koperasi yang berlandaskan suatu kegiatan atas dasar prinsip Koperasi dan sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Koperasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat yang merata sesuai dengan perkembangan perekonomian, dalam hal ini Koperasi yang dimaksud yaitu Koperasi Unit Desa (KUD). Peran penting KUD bagi masyarakat seperti terbentuknya program pemerintah mengenai perkembangan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan. Program dari pemerintah dibangun untuk masyarakat desa berupa pengadaan pangan, distribusi benih dan pupuk yang sekarang dilakukan melalui KUD.

Berhasil atau tidaknya KUD sangat berpengaruh terhadap anggotanya, sehingga KUD dituntut untuk lebih maksimal dalam mengelolanya, khususnya dalam segi keuangan yaitu bagaimana penyusunan laporan keuangannya. Melalui laporan keuangan dapat diketahui sejauh mana potensi prestasi dan kondisi keuangan yang dimiliki KUD tersebut. Maka dari itu dalam pengembangan KUD diperlukan

adanya penerapan akuntansi pertanggungjawaban dalam membantu mendelegasikan wewenang dan tanggungjawab yang ada.

Pada umumnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban dilakukan dengan cara membandingkan anggaran dan realisasi yang terjadi dari setiap unit pusat pertanggungjawaban yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja karyawan dalam mencapai suatu tujuan. Akuntansi pertanggungjawaban dalam hal ini dimaksudkan untuk menilai apakah manajer pusat pertanggungjawaban sudah melakukan tugas sesuai dengan rencana sebelumnya.

Pengelompokan dan pelaporan biaya didasarkan pada masing-masing bidang pertanggungjawaban dalam organisasi. Oleh karena itu, dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban perlu ditetapkan bidang pertanggungjawaban disetiap tingkatan manajemen yang disebut pusat pertanggungjawaban. Setiap pusat pertanggungjawaban memiliki batasan wewenang yang jelas, sehingga bisa memperoleh informasi yang akurat mengenai batasan wewenang disetiap bagian akuntansi pertanggungjawaban dalam organisasi sehingga memudahkan dalam mengendalikan biaya.

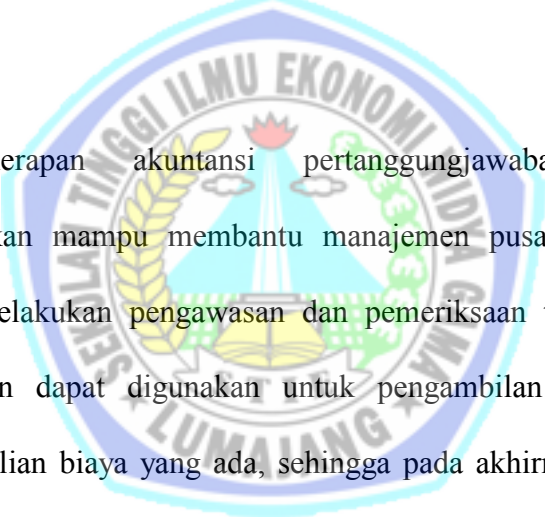
Pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban guna mendapatkan informasi, khususnya informasi mengenai pengendalian biaya. Dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk melakukan pengendalian biaya dapat dilaksanakan dengan penyelenggaraan suatu

anggaran dalam sistem pencatatan biaya yang dapat dikendalikan. Dari pencatatan biaya-biaya tersebut akan menghasilkan laporan biaya yang dapat menunjukkan kinerja manajer dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada biaya-biaya yang terjadi didalam unit usahanya.

Agar manfaat akuntansi pertanggungjawaban tercapai harus disusun anggaran untuk tiap-tiap unit organisasi melalui pembentukan pusat pertanggungjawaban guna menilai kinerja dari pusat pertanggungjawaban. Anggaran tersebut dilaporkan dari hasil perbandingan antara biaya yang sesungguhnya (realisasi) dengan biaya yang dianggarkan, sehingga hasil perbandingan tersebut dapat membantu manajer untuk mengetahui berapa besar perbedaan yang muncul. Selisih dari hasil perbandingan tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja karyawan serta memberikan motivasi kepada manajer ataupun karyawan guna meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi. Hal ini memungkinkan manajer untuk dapat menganalisis lebih lanjut penyebab terjadinya perbedaan dan juga harus dapat menelusuri ketidakefisienan masing-masing komponen, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi dan perbaikan apabila ditemukan suatu keadaan yang dapat menyebabkan sasaran maupun tujuan tidak tercapai. Informasi yang seperti ini disebut akuntansi pertanggungjawaban.

Akuntansi pertanggungjawaban banyak digunakan untuk merekam kegiatan perusahaan atau badan usaha lainnya, kemudian mengetahui unit mana yang bertanggungjawab atas aktivitas tersebut, dan menentukan unit

usaha mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien. Evaluasi diperlukan dalam akuntansi pertanggungjawaban untuk memudahkan manajemen dalam menghubungkan biaya yang terjadi dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggungjawab. Oleh karena itu, sangat perlu menerapkan sebuah akuntansi pertanggungjawaban yang menjadi suatu sistem untuk mengendalikan tanggungjawab ditiap-tiap unit usaha. Karena penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang baik dan memadai mampu mendorong perusahaan atau organisasi guna mencapai suatu tujuan, serta terciptanya suatu pengendalian dan pengukuran prestasi kerja.



Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sangat penting dikarenakan mampu membantu manajemen pusat pertanggungjawaban dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengendalian biaya dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan mengenai pengendalian biaya yang ada, sehingga pada akhirnya suatu tujuan dapat tercapai. Jika penerapan akuntansi pertanggungjawaban semakin baik, maka pengendalian biaya juga akan semakin baik. Sedangkan jika pengendalian biaya dilakukan dengan baik, maka dapat memudahkan dalam penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk pencapaian suatu tujuan.

Penelitian yang telah dilakukan berhubungan dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu salah satunya dilakukan oleh Anik (2013)

tentang Evaluasi Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya Produksi pada CV Anugerah Genteng Manado. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada CV Anugerah Genteng Manado belum memadai, masih terdapat beberapa kelemahan yaitu belum adanya penggolongan biaya dan pemberian kode rekening.

Berdasarkan uraian diatas mengenai pentingnya penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian suatu biaya yang hasilnya dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban yang dapat dilakukan dengan menerapkan sistem akuntansi pertanggungjawaban, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pengendalian Biaya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sri Tanjung Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang”**.

1.2 Batasan Masalah

Mengingat luasnya masalah yang akan dibahas, dan agar pembahasan lebih fokus serta mengarah pada masalah yang diteliti yaitu mengenai analisis penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sri Tanjung. Maka penelitian ini dibatasi pada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya untuk periode tahun 2016-2017.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sri Tanjung Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada Koperasi Unit Desa (KUD) Sri Tanjung Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penulis berharap agar penelitian ini dapat berguna bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi KUD

Dapat dijadikan masukan sebagai sarana perbaikan sehubungan dengan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya.

2. Bagi Penulis

Untuk mempraktikkan ilmu yang telah diperoleh melalui teori-teori yang sudah didapat dibangku perkuliahan secara praktis sesuai dengan kondisi dilapangan, serta sebagai referensi guna menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai akuntansi pertanggungjawaban.

3. Bagi Pembaca

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang konsep dan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, serta dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama.

